

**KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA TERHADAP PENDIDIKAN  
MULTIKULTURAL, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, DAN  
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA:  
Studi Terhadap Ideologi Pendidikan Islam di Indonesia**

Mukhammad Abdullah\*

**Abstract**

Plurality of ethnicities, religions, and cultures is Indonesian historical facts. Diversity can be a gift or a disaster. If properly managed it can enrich human lives; on the contrary, if not properly managed it can lead to disaster in the form of tension, conflict, and violence. The function Islamic Education as a subject that is still preserved in the National Education System is expected to shape the character of students, so that they become Muslims who fear (in the sense of obedience to Allah), and at the same time be a citizen of Indonesia that is tolerant, accepting the condition of multi-cultural, and reject all forms of oppression that degrades human dignity. It specifically can be seen from learning objectives, that is to realize the Indonesian people who are religious, noble, knowledgeable, diligent to worship, intelligent, productive, honest, fair, ethical, disciplined, tolerant (tasamuh), maintaining harmony and developing religious culture at school. Philosophically, Islamic education is relevant to and an integral part of the national education system. The position of Islamic education as a subsystem of national education serves not only as a supplement, but as a substantial component. It means that Islamic education is a crucial component of national educational journey. Since the government has proposed the concept of multicultural education, civic education, and character education, then it cannot get rid of Islamic education.

**Key words:** ideology of Islamic education, multicultural education, civic education, character education of the nation.

**Pendahuluan**

Pluralitas etnis, agama, dan budaya adalah sebuah kenyataan sejarah bangsa Indonesia. Keragaman bisa menjadi anugerah sekaligus bencana. Jika dikelola dengan baik dapat memperkaya kehidupan manusia. Namun, jika tidak dapat dikelola dengan baik dapat menimbulkan bencana berupa ketegangan,

---

\* Dosen Manajemen Pendidikan Islam dan Ketua 1 STAIN Kediri, Email: dr\_abduhkdr@yahoo.com

konflik, dan kekerasan, sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Indonesia.<sup>1</sup>

Pendidikan adalah salah satu media bagi manusia untuk menjadi lebih manusiawi. Pendidikan tidak bisa direduksi maknanya hanya sekedar menyiapkan peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan dalam dunia industri. Makna pendidikan jauh dari sekedar kepentingan pragmatis seperti ini. Tetapi, tidak semua orang mendudukan pendidikan pada posisi yang ideal, sebagian mereka justru mereduksi dan membonsai pendidikan dalam kepentingan-kepentingan berjangka pendek, praktis, dan pragmatis.<sup>2</sup>

Beragamnya kepentingan dalam pendidikan membuat pendidikan bersifat ambigu. Pendidikan dapat membentuk pribadi-pribadi yang pragmatis atau idealis, pendidikan dapat menjadi kekuatan produktif atau reproduktif, yaitu menjadi kekuatan untuk memproduksi struktur sosial yang baru atau mereproduksi struktur sosial yang lama; mempertahankan hegemoni atau sebagai kekuatan konter-hegemoni; mempertahankan budaya bisu atau membangun budaya kritis; mempromosikan dan meneguhkan *spirit pluralisme* atau mendegradasi *spirit pluralisme*; membangun harmoni intra dan antar umat beragama atau menciptakan ketegangan, konflik, kecurigaan, dan disharmoni. Sifat ambigu pendidikan adalah

---

<sup>1</sup> Konflik dan kekerasan adalah sebuah *dehumanisasi*, dan bukanlah *ontological vocation* manusia. Panggilan ontologis manusia adalah *humanisasi*, yaitu proses menjadi manusia sejati, manusia otentik, *the fully human beings* (meminjam bahasa Paulo Freire). Dalam bahasa Colin Lankshear manusia adalah "makhluk praksis yang hidup secara otentik hanya ketika terlibat dalam transformasi dunia," yaitu transformasi menuju kehidupan yang lebih manusiawi, kehidupan yang menghargai hak dan martabat manusia, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Lihat: Agus Nuryanto, "Kontribusi Pendidikan Agama dalam Memperkuat Masyarakat Pluralistik Demokratik (Perspektif Islam)" <https://z4muttaqien.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Juni 2015. Lihat Juga: Colin Lankshear, "Functional Literacy from a Point of View," dalam Peter McLaren dan Peter Leonard (ed), Paulo Freire: *A Critical Encounter* (London and New York: Routledge, 1993). Lihat juga: Agus Nuryanto, "Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam (Perspektif Pedagogik Kritis)". *Kependidikan Islam*, (2009), Vol. 4: 107-125. Lihat Juga: Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary ed.* (New York: Continuum, 2006), 71-87.

<sup>2</sup> Peter Mc Laren mengemukakan Hubungan antara kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan yang hanya bertujuan mendapatkan profit material dibanding untuk menciptakan kehidupan global yang lebih baik. Lihat: Peter McLaren, *Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundation of Education* (New York: Longman, 1998) dalam Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis (Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan)* (Yogyakarta: Resist Book, 2011).

sebuah keniscayaan, sebab masing-masing orang memiliki persepsi dan kepentingan yang berbeda terhadap pendidikan.<sup>3</sup>

Untuk itu pendidikan sepanjang sejarahnya selalu bersifat antisipatif, yaitu mempersiapkan peserta didik (generasi penerus bangsa) agar dapat melaksanakan peran dan tugas hidup dan kehidupannya di masa depan.<sup>4</sup> Maka mereka dibekali dengan pendidikan multikultural, pendidikan kewarga-negaraan, dan pendidikan karakter bangsa, namun hal ini juga masih dirasakan rentan terhadap pengaruh perubahan dalam kehidupan politik, tidak ajek dalam sistem kurikulum dan pembelajarannya; pendidikan gurunya yang cenderung terlalu memihak pada tuntutan formal-kurikuler di sekolah dan kurang memperhatikan pengembangan pendidikan multikultural, pendidikan kewarga-negaraan, dan pendidikan karakter bangsa sebagai bidang kajian pendidikan disiplin ilmu, epistemologi pendidikan multikultural, pendidikan kewarga-negaraan, dan pendidikan karakter bangsa tidak berkembang dengan pesat; pembelajaran multikultural, kewarganegaraan, dan karakter bangsa yang cenderung berubah peran dan fungsi menjadi proses indoktrinasi ideologi negara, tidak kokohnya dan tidak koherennya landasan ilmiah pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter bangsa sebagai program pendidikan demokrasi.

Dalam hal ini fungsi pendidikan agama menjadi sangat penting, sebagaimana pendidikan Islam merupakan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*Insan kamil*) sesuai dengan norma Islam.<sup>5</sup> Islam sesungguhnya bukan hanya satu sistem teolog semata, tetapi Ia merupakan peradaban yang lengkap.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Nuryanto, "Kontribusi Pendidikan Agama dalam Memperkuat Masyarakat Pluralistik Demokratik (Perspektif Islam)" <https://z4muttaqien.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Juni 2015.

<sup>4</sup> Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 157.

<sup>5</sup> Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Pelajar, 1992), 20.

<sup>6</sup> Namun di Indonesia, Islam sebagai suatu peradaban yang komplit masih merupakan cita-cita dan belum merupakan kenyataan". Lihat: Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), s.

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ada dualisme keilmuan, yaitu ilmu Islam dan ilmu umum sehingga timbul istilah ini sekolah Islam dan itu sekolah umum. Adanya jurang pemisah antara agama dengan ilmu pengetahuan merupakan tragedi yang telah memudarkan bangsa Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam dalam menyongsong pembangunan jangka panjang yang titik sentralnya menyangkut kualitas manusia tentu tidak lepas dari kegiatan pendidikan.

Atas dasar pemikiran di atas penulis melakukan kajian terkait dengan berbagai persoalan apa dan bagaimana kontribusi pendidikan agama terhadap pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan karakter bangsa jika ditelaah dari sudut pandang ideologi pendidikan Islam.

### **Ideologi Pendidikan Islam di Indonesia**

Ideologi merupakan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohani sebuah gerakan kelompok sosial atau kebudayaan. “Pendidikan Islam<sup>7</sup> merupakan usaha yang lebih khusus ditekankan untuk lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam”.<sup>8</sup> Dalam hal ini pendidikan Islam harus melakukan interpretasi dan reinterpretasi terhadap nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan perubahan terhadap pendidikan.

---

<sup>7</sup> Dalam khazanah Islam, ada tiga istilah yang berhubungan dengan makna pendidikan. Tiga istilah tersebut adalah *ta'lim*, *ta'dib*, dan *tarbiyah*. Secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses Pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai “pendidik” seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia. Dalam pengertian luas, pendidikan Islam yang terkandung dalam terma *al-tarbiyah* terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: *pertama*, memelihara dan menjaga *fitrah* peserta didik menjelang dewasa (*baligh*); *kedua*, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan; *ketiga*, mengarahkan seluruh *fitrah* menuju kesempurnaan; *keempat*, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Lihat: Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat* (Bandung: Diponegoro, cet-3, 1996), 15-32. Lihat Juga: Abdurrahman Shaleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Islam berdasarkan Al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 20. Lihat Juga: Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 41. Lihat juga: Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 32. Lihat juga: Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 19. Lihat Juga: Muhammad Fadhil Al-Jamali, *Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur'an*, Terj. Judial al-asani, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 3. Lihat juga: Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21*, (Jakarta: Pustaka Al-husna, 1988), 67. Lihat juga: Oemar Mohammad Al-Thoumy Al-Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 41.

<sup>8</sup> Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan.*, 20.

Bila kita menyebut pendidikan Islam konotasinya sering dibatasi pada pendidikan agama Islam. “Padahal ketika dikaitkan dengan kurikulum pada pendidikan formal dan non formal pendidikan hanya terbatas pada bidang studi agama seperti Tauhid, Fiqh, Tarih Nabi, membaca al-Qur’an, Tafsir dan Hadis”.<sup>9</sup> Istilah pendidikan Islam tidak lagi hanya berarti pengajaran teologik atau pengajaran al-Qur’an, Hadis, Fiqih, tetapi memberi arti pendidikan di semua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang agama Islam. Pendidikan Islam menurut Achmadi meliputi segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dan sumber daya manusia insani menuju terbentuknya *insan kamil* sesuai dengan norma Islam.<sup>10</sup>

Sebagaimana dikatakan M. Natsir, bahwa Islam meliputi aspek masyarakat dan kebudayaan serta menolak pengertian dalam arti sempit. Jadi Islam tidak hanya meliputi hubungan manusia dengan Tuhan akan tetapi juga sesama manusia, dunia serta masyarakat luas sejauh yang diatur dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. “Dapat dikatakan bahwa dalam agama Islam ini selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan juga sesama manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi”.<sup>11</sup>

Islam bukan hanya semata-mata dalam arti sempit melainkan mencakup aspek-aspek lainnya dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menolak pemisahan antara agama dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Memperdalam Islam berarti mempelajari secara mendalam segala bidang ilmu. Karena, semua ilmu pada hakekatnya adalah ilmu Islam baik yang dinamakan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksakta.<sup>12</sup> Sehingga kita perlu mengukur

---

<sup>9</sup> Ibid., 19.

<sup>10</sup> Tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuannya secara optimal. Lihat: M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 121. Fungsi Pendidikan Islam, yaitu menyediakan fasilitas yang dapat memungkin tugas pendidikan berjalan lancar baik itu yang bersifat struktural maupun institusional. Lihat: Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung: Trikarya, 1993), 144.

<sup>11</sup> M. Arifin, *Menguak Misteri Ajaran-Ajaran Agama Besar* (Jakarta: Golden Terayan, 1987), 4.

<sup>12</sup> Pendidikan Islam adalah sebuah ilmu yang berpautan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, yang mencakup semua bidang hubungan dengan orang lain, alam, lingkungan, dan Tuhan, yang merupakan penentu masa depan dan mutu bagi setiap individu manusia. Lihat:

mitos yang telah lama menghantui alam pikiran sebagian masyarakat Indonesia yaitu kepercayaan adanya jurang pemisah antara agama dan ilmu pengetahuan yang telah memundurkan bangsa Indonesia. Tetapi keduanya justru tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya bahkan perlu disatukan. Untuk perlu dirumuskan antara lain: Mendirikan tempat-tempat pendidikan di mana ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum diajarkan bersama-sama. Diharapkan akan lahir *ulama intelegensia* baru, yang selain pandai ilmu agama juga memahami ilmu-ilmu pengetahuan umum dan disinilah timbul ide ulama intelek.

Seiring dengan perkembangan zaman muncul sebuah pertanyaan apakah substansi ideologi pendidikan Islam di tengah persaingan global. Achmadi berpendapat bahwa secara normatif memang tidak perlu dilakukan perubahan karena diyakini membuat nilai-nilai transcendental memiliki kebenaran mutlak. Akan tetapi, dalam rangka menyusun strategi yang relevan dengan perubahan perlu dilakukan interpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma tersebut dan reinterpretasi terhadap pemahaman masa lalu, sehingga menghasilkan formulasi strategi pendidikan Islam yang transformatif. Pada dasarnya implementasi prinsip ideologi pendidikan paradigma *humanisme teosentris* adalah:

*Pertama, liberalisme* bukan berarti sepenuhnya berkiblat pada *liberalisme* pendidikan sebagaimana pandangan Jonh Dewey dengan teori *progesivisme* dan *eksperimentalisme*, tetapi bertolak dari prinsip kebebasan yang bertanggung jawab seperti diisyaratkan dalam al-Qu'ran bahwa manusia diberi potensi kebebasan kehendak untuk menentukan pilihan,<sup>13</sup> akan memilih yang baik atau yang buruk, mau berusaha mengubah nasibnya atau tidak, bahkan termasuk pilihan untuk beriman atau kufur.

---

Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental Peranannya dalam Pendidikan dan Pengajaran* (Jakarta: IAIN, 1984), 4 dan 7.

<sup>13</sup> Dan biar pendidikan tersebut tidak salah sasaran, maka kualitas kepribadian manusia merupakan prioritas sebagai syarat awal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena pendidikan, merupakan proses yang memberikan kebutuhan bagi pertumbuhan dan integritas pribadi seseorang secara bebas dan bertanggung jawab. Lihat: Jhon D. McNeil, *Kurikulum: Sebuah Pengantar Komprehensif*, terj. Subandiah (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 5.

*Ke dua, humanisasi* disini bukan merujuk pada *humanisme* sekuler di Barat yang munculnya sebagai protes terhadap agama yang dianggap tidak bisa diharapkan untuk mengadvokasi masalah kemanusiaan, bahkan agama dianggap sering menimbulkan masalah kemanusiaan,<sup>14</sup> tetapi didasarkan pada fitrah dalam Islam yang memandang manusia sebagai makhluk yang paling mulia dengan potensi-potensi insani (SDM) yang dapat dikembangkan.<sup>15</sup> Sehingga mampu berperan sebagai *khalifah Allah* di bumi dan bisa mendekatkan diri kepada Allah.<sup>16</sup> Setiap orang sebagai manusia setara dihadapan Tuhan, yang membedakan hanya ketakwaannya. Oleh karena itu *humanisasi* dalam Islam adalah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap harkat dan martabat manusia dalam rangka optimalisasi pengembangan SDM yang dimilikinya. *Ke tiga, teransendensi* disini bersifat pemberian makna *ubudiyah* dalam proses *liberalisasi* dan *humanisasi*.

Sebagai pijakan pendidikan Islam perlu ditegaskan kembali substansi *ideologi pendidikan Islam paradigma humanisme teosentris*. Ideologi pendidikan Islam yang secara eksplisit membedakan dengan ideologi lainnya. Mengenai manusia sebagai subyek dan obyek pendidikan didasarkan atas pandangan Islam tentang konsep fitrah, dasar tujuan pendidikan didasarkan atas nilai-nilai *Ilahiyah* dan *insaniyah*, begitu pula mengenai isi pendidikan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 133.

<sup>15</sup> Melalui sosok *insan kamil* yang demikian, peserta didik diharapkan mampu memadukan fungsi iman, ilmu, dan amal secara integral bagi terbinanya kehidupan yang harmonis baik di dunia maupun akhirat. Lihat: Sebagaimana diuraikan dalam firman Allah pada QS. Al-Mujadalah 58:11.

<sup>16</sup> Tujuan akhir pendidikan Islam yang akan dicapai adalah mengembangkan *fitrah* anak didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akal nya secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai *khalifah fil-ard*. Lihat: Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21.*, 67.

<sup>17</sup> Kalau digali dan dicermati, indikasi kepribadian yang baik, terkonsep dalam pendidikan Islam. Hal tersebut terlihat dari beberapa karakteristiknya, yang antara lain: 1). Mengedepankan tujuan agama dan akhlak. Karakteristik ini mewarnai karakteristik-karakteristik lain, utamanya yang berorientasi pada *tauhid* dan penanaman nilai-nilai. 2) Selaras dengan *fitrah* manusia termasuk berkenaan dengan pembawaan, bakat, jenis kelamin, potensi, dan pengembangan psiko-fisik. 3) Merespon dan mengantisipasi kebutuhan nyata individu dan masyarakat, serta mengusahakan solusi terkait dengan masa depan perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus. 4) Fleksibel karena didorong dengan kesadaran hati, tanpa paksaan. 5) Realistik, dengan mengembangkan keseimbangan dan proporsionalitas antara pengembangan intelektual, emosional, dan spiritual. 6) Menghindarkan dari pemahaman dikotomik terhadap ilmu

Dalam mengaplikasikan Ideologi Pendidikan Islam tidak harus mengubah paradigma ideologinya, tetapi cukup pada tataran strateginya dengan melakukan interpretasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>18</sup>

### **Pendidikan Multikultural di Indonesia**

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) sesungguhnya bukanlah pendidikan khas Indonesia. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan khas Barat. Kanada, Amerika, Jerman, dan Inggris adalah beberapa contoh negara yang mempraktikkan pendidikan multikultural. Ada beberapa nama dan istilah lain yang digunakan untuk menunjuk pendidikan multikultural. Beberapa istilah tersebut adalah: *intercultural education*, *interethnic education*, *transcultural education*, *multiethnic education*, dan *cross-cultural education*.<sup>19</sup>

Dalam konteks Indonesia, konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita, namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan *primordialisme*. Untuk itu, dirasakan kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat *primordialisme* tersebut.<sup>20</sup>

---

pengetahuan agama dan ilmu-ilmu yang lain, sekaligus menghindarkan setiap individu dari pemahaman agama parsial yang dapat membuat peserta didik kehilangan dan bersikap ekstrim. Lihat: Omar Mohammad Al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam.*, 519-522.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ekstrand, L.H. "Multicultural Education," dalam Saha, Lawrence J. (eds.). *International Encyclopedia of the Sociology of Education* (New York: Pergamon, 1997), 345-6. Lihat juga James A. Banks, "Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. In the Handbook of research on multicultural education" (New York: Macmillan. Ladson-Billings, G. Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, (1995), 465-492. Lihat Juga: S. Lee, Asian American as Model-minorities? A look at their academic performance. *American Journal of Education* (1997), 103, 121-159. Lihat Juga: Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, 2-3.

<sup>20</sup> Alasan lain yang melatarbelakangi pendidikan multikultural di Indonesia karena adanya semboyan bangsa Indonesia: "Bhinneka Tunggal Ika". Semboyan yang sangat adil dan demokratis ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang berbedabeda tetapi dalam kesatuan Indonesia. Semboyan ini mengandung seni manajemen untuk mengatur keragaman Indonesia (*the art of managing diversity*), yang terdiri dari 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua franca*), 13.000 pulau, 5 agama resmi, dan latar belakang

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya.<sup>21</sup> Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan<sup>22</sup> yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mampu mengakomodir sekian ribu perbedaan dalam sebuah wadah yang harmonis, toleran, dan saling menghargai. Inilah yang diharapkan menjadi salah satu pilar kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

---

kesukuan yang sangat beragam. Dengan semboyan ini diharapkan masing-masing individu dan kelompok yang berbeda suku, bahasa, budaya, dan agama dapat bersatu dan bekerjasama untuk membangun bangsanya secara lebih kuat. Lihat: Leo Suryadinata, dkk., *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 30, 71, 104, dan 179.

<sup>21</sup> Keragaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu keragaman pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan). Lihat: James A. Banks, (ed.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989), 14.

<sup>22</sup> Tujuan pendidikan multikultural ada tiga, yaitu sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Maksudnya, tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek sikap (*attitudinal goals*) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek pengetahuan (*cognitive goals*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran (*instructional goals*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural. Lihat: Ekstrand, L.H. "Multicultural Education," dalam Lawrence J. Saha, (eds.), *International Encyclopedia of the Sociology of Education* (New York: Pergamon, 1997), 349.

<sup>23</sup> Pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Dari hal ini dapat diwujudkan dengan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan pertimbangan keragaman. Lihat: Ekstrand, L.H. "Multicultural Education," dalam Lawrence J. Saha, (eds.), *International Encyclopedia of the*

Mengingat bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak budaya, penerapan pembelajaran multikultural sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Pembelajaran multikultural bisa menanamkan sekaligus mengubah pemikiran peserta didik untuk benar-benar tulus menghargai keberagaman etnis, agama, ras, dan antargolongan.<sup>24</sup>

Rasional tentang pentingnya pembelajaran/pendidikan multikultural, karena strategi pendidikan ini dipandang memiliki keutamaan-keutamaan, terutama dalam: 1) memberikan terobosan baru pembelajaran yang mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka siswa atau mahasiswa sehingga tercipta manusia (warga negara) antarbudaya yang mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan (*nonviolent*); 2) menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan afeksi yang kuat; 3) model pembelajaran multikultural membantu guru<sup>25</sup> dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama memberikan kemampuan peserta didik dalam membangun kolaboratif dan memiliki komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk; 4) memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa SARA yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka.

Melalui pembelajaran berbasis multikultural, sikap dan *mindset* (pemikiran) siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. Hal ini penting sebab dapat menghapuskan diskriminasi.<sup>26</sup>

Ada beberapa hal yang bisa didapat dari adanya pembelajaran multikultural, antara lain: 1) penerapan pendidikan multikultural sangat penting

---

*Sociology of Education*, 348. Lihat juga: Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 144.

<sup>24</sup> Jose A. Cardinas, *Multicultural Education: A Generation of Advocacy* (America: Simon & Schuster Custom Publishing, 1975), 131.

<sup>25</sup> Menurut Garcia (1982), gaya pengajaran guru merupakan gaya kepemimpinan atau teknik pengawalan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran (*the kind of leadership or governance techniques a teacher uses*). Lihat: Garcia, Ricardo L., *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies* (New York: Harper & Row Publisher 1982), 146.

<sup>26</sup> Sebenarnya, Indonesia memberikan perhatian yang baik untuk pendidikan multietnis yang telah platform bersama dalam merancang sebuah tipe pembelajaran berdasarkan Bhineka Tunggal Ika. Lihat: Azyumardi Azra, "Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika" dalam Tsaqofah, Vol.I, No.2 (2003), 19.

untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan *mindset* (pemikiran) siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman; 2) metodologi dan strategi pembelajaran multikultural dengan menggunakan sarana audio visual telah cukup menarik minat belajar anak serta sangat menyenangkan bagi siswa dan guru. Karena, siswa secara sekaligus dapat mendengar, melihat, dan melakukan praktik selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini menjelaskan bahwa pembelajaran multikultural sangat baik untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa yang lebih tinggi; 3) guru-guru dituntut kreatif dan inovatif sehingga mampu mengolah dan menciptakan desain pembelajaran yang sesuai.<sup>27</sup> Termasuk memberikan dan membangkitkan motivasi belajar siswa, serta memperkenalkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap toleransi, solidaritas, empati, musyawarah, dan egaliter kepada sesama. Para siswa pun bisa menjadi lebih memahami kearifan lokal yang menjadi bagian dari budaya bangsa; 4) pendidikan multikultural membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat; 5) pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis; 6) dapat membimbing, membentuk dan mengkondisikan siswa agar memiliki mental atau karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik perbedaan

---

<sup>27</sup> Farid Elashmawi dan Philip P. Harris (1994) menawarkan 6 (enam) kompetensi multikultural guru, yaitu: (a) memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas, (b) terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman siswa, (c) siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender; (d) memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas, (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f) berorientasi pada program dan masa depan. Selain itu, James A. Bank (1989) menambahkan kompetensi multikultural lain yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: (a) sensitif terhadap perilaku etnik para siswa, (b) sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi ajar, dan (c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam pembelajaran. Lihat: James A. Banks, (ed.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989), 104-105.

ideologi, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi dan perbedaan agama.<sup>28</sup> Dengan pembelajaran multikultural para lulusan akan dapat memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala problem kehidupannya.

Maka dengan adanya mata pelajaran kewarganegaraan dan Agama yang telah diajarkan di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, disempurnakan dengan memasukan pendidikan multikultural, seperti budaya lokal antar daerah kedalamnya, agar generasi muda bangga sebagai bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan demikian, pendidikan multikultur adalah pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa sebagai calon warga negara, agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, bisa hidup berdampingan dalam keragaman watak kultur, agama dan bahasa, menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas, dan dapat bersama-sama membangun kekuatan bangsa sehingga diperhitungkan dalam percaturan global dan *nation dignity* yang kuat.

Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada empat prinsip. *Pertama*, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat.<sup>29</sup> *Ke dua*, keragaman budaya dijadikan dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum, seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. *Ke tiga*, budaya dilingkungan unit pendidikan dari mulai pendidikan tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi sehingga sumber belajar dan objek studi harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa. *Ke empat*, kurikulum<sup>30</sup> berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional.

---

<sup>28</sup> Untuk kelas yang beragam latar belakang budaya siswanya, agaknya, lebih cocok dengan gaya kepemimpinan guru yang demokratis (Donna Styles, 2004). Melalui pendekatan demokratis ini, para guru dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus. Lihat: Abdullah Aly, "Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia", dalam Jurnal Ishraqi, Volume II Nomor 1, Januari-Juli (2003), 60-73.

<sup>29</sup> Suatu posisi dan gerakan yang dianggap filosofis bahwa gender, kesukuan, rasial, dan keanekaragaman budaya dari suatu masyarakat plural harus dicerminkan di semua lembaga pendidikan, termasuk staf, norma-norma, nilai-nilai, kurikulum, dan siswa. Lihat: James A. Banks, & McGee Banks, C. A. (Eds.), *Multicultural education: Issues and Perspectives* (3rd ed). (Boston: Allyn and Bacon (1997), 435.

<sup>30</sup> Kurikulum yang diperlukan dalam pendidikan multikultural mempunyai tiga komponen utama; yaitu isi, metode, dan manusia. Isi mencakup ilmu pengetahuan, teori, konsep, fakta, kontribusi,

## **Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia**

Pendidikan kewarganegaraan selanjutnya disebut PKn, dalam bahasa Inggris disebut dengan *citizenship education* atau *civics education*. Untuk itu ada dua istilah yang harus diklarifikasi yaitu istilah *civics/citizenship* dan *civics education/citizenship education*. Istilah *civics* atau *citizenship* diartikan dengan kewarganegaraan, yaitu berhubungan dengan status hukum seseorang atau individu dalam organisasi yang disebut negara-bangsa (*nation state*). Status tersebut diatur oleh hukum yang dibuat oleh rakyat negara tertentu melalui suatu proses sesuai sistem yang berlaku di negara tersebut, apakah sistem demokrasi atau sistem yang lainnya. Hukum tersebut menentukan hak-hak, kewajiban-kewajiban, tanggungjawab dan tugas-tugas warga negara. Jadi *civics* atau *citizenship* atau kewarganegaraan adalah pola hubungan timbal balik antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat) dan ke dua belah pihak diikat oleh seperangkat hukum atau undang-undang.

Seorang warga negara mempunyai dua lapangan kehidupan yaitu kehidupan publik (*public life*) dan kehidupan pribadi (*private life*). *civics/citizenship* atau kewarganegaraan terkait dengan kehidupan publik seseorang tetapi ia juga memperhatikan kehidupan pribadi seseorang sebab antara kehidupan publik dan pribadi tidak bisa dipisahkan. Jadi Kewarganegaraan mengatur kehidupan individu dalam konteks hubungan antara individu dan negara. *The World Books Encycloppedia* (1999) menjelaskan:

*Citizenship is full membership in a nation or in some other unit of government. Citizenship also called nationality. Almost all people have citizenship in at least one country. Citizens have certain rights, such as*

---

dan perspektif dari kelompok yang berbeda suku, etnisitas, gender, bahasa, kelas sosial, agama, orientasi seksual, cacat dan tidak cacat, kepercayaan politik dan sebagainya yang secara historis tidak terrepresentasikan dalam ranah pendidikan. Metode, mencakup strategi pembelajaran yang mengakomodasi gaya pengajaran dan pembelajaran yang berbeda, kebijakan-kebijakan akademik yang mendukung rekrutmen, mentoring, memori siswa multikultural, pengajar, populasi staff, dan proses kurikulum yang mendorong eksplorasi, pengembangan, dan implementasi kurikulum multikultural. Manusia, menyangkut siswa multikultural, pengajar, dan populasi staff yang mendukung dan mengembangkan implementasi kurikulum multikultural melalui metode yang telah digunakan.

*the right to vote and the right to hold public office. They also certain duty to pay taxes and to serve on a jury.*<sup>31</sup>

Sejalan dengan hal seperti di atas, *The Encyclopedia Americana* (1999) menegaskan pula tentang konsep kewarganegaraan sebagai berikut:

*Citizenship is a relationship between an individual and a state involving the individual full political membership in a state and his permanent allegiance to it. Others person may be subject to authority of the state and may event owe it allegiance, but the citizen has duties, rights, responsibilities, and privileges that the non citizen share to a lesser degree or not at all. The status of citizen is official recognition of the individual's integration into political system.*<sup>32</sup>

Kemudian Butts (1980) mengatakan bahwa:

*The origins of the idea of citizehship are based upon membership in a political community regulated by manmade laws rather than upon membership in a family or tribe, kinship, religion, ethic background or other inherited status.*<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian dari istilah *citizenship* (kewarganegaraan) di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa konsep kewarganegaraan adalah suatu ajaran yang memuat pola-pola hubungan antara individu dan negara. Hubungan dimaksud adalah hubungan yang bersifat publik karena menjadi warganegara berarti menjadi anggota *political community* dalam hal ini adalah negara. Komunitas politik memiliki banyak aspek di dalamnya seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, hak, kewajiban dan lain-lain. Semua aspek ini diatur oleh hukum yang dibuat berdasarkan suatu proses yang berlaku di negara tertentu.

Untuk mendidik warganegara yang baik di sebuah negara diperlukan pendidikan kewarganegaraan (PKn) atau *citizenship education/civics education*. Cogan (1999) mengartikan *civic education* sebagai "*...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their*

---

<sup>31</sup>*The World Book Encyclopedia* (Chicago: World Book Inc., 1999), Vol. 4, 568.

<sup>32</sup> *Encyclopedia Americana* (Danbury: Grolier Inc., 1999), Vol.16, 742.

<sup>33</sup> R. Freeman Butts, *The Revival of Civic Education: A Rationale for Citizenship in American School* (Palo Alto (CA.): Phi Delta Cappa, 1980), 25.

*communities in their adult lives*".<sup>34</sup> Atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan (1999) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen". Dalam tulisan ini istilah pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti "*citizenship education*" atau "*education for citizenship*" yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Di samping itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi.

Menurut definisi tersebut di atas warga negara yang baik tergantung kepada sistem kenegaraan atau kaidah yang berlaku di negara itu.<sup>35</sup> Patut dicatat, bahwa ada kaidah-kaidah dan nilai-nilai universal yang memayungi kaidah-kaidah nasional dari negara-negara di dunia. Negara-bangsa dilarang membuat aturan-aturan hukum ataupun kebijakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai universal seperti dalam hal pelaksanaan pemerintahan demokrasi, hak

---

<sup>34</sup> John J. Cogan, *Developing The Civil Society The Rule of Civic Education* (Bandung: CISED, 1999), 4.

<sup>35</sup> Warga negara Amerika Serikat yang baik, sebagai contoh, hanya dapat diukur dengan sistem hukum dan sistem pemerintahan yang berlaku di Amerika Serikat. Demikian juga kiranya di Indonesia, warga negara Indonesia yang baik hanya bisa diukur dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Lihat: Azwar Ananda, "Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter Bangsa". *Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan* Vol 11, No 1 (2012), 260. <http://ejournal.unp.ac.id>. Di akses 15 Mei 2015.

azazi manusia, keadilan, kemerdekaan dan persamaan walaupun penerapannya bisa bervariasi di setiap negara.<sup>36</sup>

Oleh sebab itu PKn yang dimaksud adalah PKn yang bertujuan mendidik peserta didik untuk hidup dalam sebuah negara demokrasi. Warganegara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan agar bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik, berpartisipasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan aspek-aspek lainnya.<sup>37</sup>

Pendidikan dapat dibagi atas dua golongan besar yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah (*Civic Education for School*) dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat (*Civic Education for Society*). Ke dua golongan pendidikan kewarganegaraan ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mendidik warganegara yang baik yaitu berpengetahuan, cerdas dan terampil dalam kehidupannya sebagai warga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah (*civic education for school*) adalah pendidikan kewarganegaraan yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta mulai dari jenjang pendidikan usia dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi (PT). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003) yang menegaskan bahwa kurikulum sekolah harus memuat pendidikan agama, bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan.

---

<sup>36</sup> Pemerintah sebuah negara mengatakan bahwa negaranya adalah negara demokrasi, tetapi di negara dimaksud tidak ada kebebasan pers, tidak ada penegakan HAM, tidak ada peradilan yang independen dan sederet persyaratan lainnya. Maka negara itu tidak bisa menyebut dirinya negara demokrasi karena demokrasi punya ukuran dan nilai-nilai/kaidah-kaidah universal yang harus dihormati. Ibid.

<sup>37</sup> Peserta didik harus mengerti bagaimana "*how to guard against tyranny of majority, allow everyones, including those in the minority, to freely and fairly participate in political and civic life to influence their government and its public policy decisions*" (Vontz, 2000). Banyak para pakar dan filosof yang telah mengembangkan hal yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan yang demokratik, mulai dari zaman Plato hingga pemikir-pemikir mutakhir seperti Amy Guttmann dan John Rawls. Sejauh ini, ada dua teori yang membahas pola pendidikan Kewarganegaraan yang demokratik yaitu Pertama, Teori *Civic Republicanism* menekankan pentingnya "*public life of the interests of community*" dalam pendidikan kewarganegaraan. Menurut teori ini, individu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bertindak bersama-sama atau memperjuangkan kepentingan umum. Sebaliknya, Teori *Democratic Liberalism* adalah sebuah teori pemikiran politik yang menekankan pada otonomi individu, kemerdekaan dan kebebasan individu sebelum kepentingan bersama atau kemauan bersama. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu adalah merdeka dan memiliki hak-hak tertentu yang memerlukan perlindungan. Ibid., 260-261.

Untuk itu pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional beserta perangkat-perangkatnya telah membuat pedoman penulisan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan melalui permen No.22/2006, 23/2006 dan 24/2006 tentang standar isi, standar kompetensi lulusan dan pedoman pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah telah berjalan walaupun masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.

Pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat (*civic education for society*) ditujukan agar semua elemen anggota masyarakat secara individu dapat mengetahui, mengerti, memahami dan melaksanakan tatakrama, tertib dan bertindak sesuai dengan norma kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tentu saja sangat tidak cerdas kalau seorang individu dalam masyarakat kalau tidak mengetahui dan mengerti tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kehidupan publiknya. Membuang sampah ke dalam sungai, mematuhi peraturan lalulintas, tertib di jalan raya, membiasakan antri adalah contoh perilaku terpuji yang harus diajarkan kepada masyarakat agar masyarakat hidup tertib dan damai.<sup>38</sup>

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di negara Republik Indonesia Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diberikan kepada seluruh warganegara Indonesia baik sedang duduk dibangku sekolah (mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi) maupun yang sudah tamat sekolah (pegawai negeri,

---

<sup>38</sup> Sejak lahirnya era reformasi, pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat (*civic education for society*) sepertinya menjadi “daerah tak bertuan” Tidak ada satu instansi pun yang memperhatikan bagaimana mendidik warganegara agar menjadi warganegara yang baik. Warganegara yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, anggota ABRI/POLRI, pegawai BUMN/Swasta, anggota DPR/DPRD, pejabat sipil militer dan lainnya, harus senantiasa dididik menjadi warganegara yang agar bisa hidup dilingkungannya secara baik. Hal ini tidak ada jaminan seorang pejabat publik atau pegawai negeri sipil menjadi warganegara yang baik dilingkungan tempat tinggalnya. Apalagi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai sopir angkot, sebagai sopir bis kota, nelayan, pedagang, pedagang kakilima, pedagang asongan, tukang becak, tukang ojek, petani yang dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dinisiasikan bagaimana menjadi warganegara yang baik. Maka mereka harus selalu dididik bagaimana hidup secara baik dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Lihat: Sunarso, “Politik Pendidikan Tiga Rezim: Kajian Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi”, Laporan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011. <http://staff.uny.ac.id>. (Diakses pada 15 Mei 2015), 213-224.

pengusaha, sopir angkutan/bus kota, anggota parlemen nasional, kabupaten/kota, pemimpin informal dan lapisan masyarakat lainnya).

Bagi warganegara yang duduk dibangku sekolah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam rangka pembentukan kepribadian atau karakter yang cerdas. Warganegara yang baik adalah warganegara yang mencintai tanah airnya, memiliki jiwa patriotisme, memiliki rasa kekeluargaan yang diwujudkan dengan disiplin diri, jujur, menghormati simbol-simbol negara, toleransi, menyadari bahwa negara dan bangsa Indonesia adalah tanah air dimana dia hidup dan dibesarkan. Inilah yang disebut dengan *civic education for school*.

Bagi warganegara yang sudah menamatkan pendidikan formal maupun yang putus sekolah, juga harus mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Program pendidikan kewarganegaraan inilah warganegara dapat mengetahui dan memahami perkembangan dan dinamika kehidupan bersama sebagai satu negara dan satu bangsa. Melalui pendidikan inilah mereka mengetahui adanya undang-undang baru baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, perda kabupaten/kota ataupun peraturan bupati/wali kota. Mereka harus diberikan juga pendidikan nilai-nilai kebangsaan seperti kejujuran, anti korupsi, taat hukum, tidak main hakim sendiri, toleransi hidup beragama, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan bersama sebagai satu negara dan satu bangsa. Inilah yang disebut *civic education for society*.<sup>39</sup>

Esensi dan substansi materi ajar<sup>40</sup> pendidikan kewarganegaraan yang ada pada negara demokrasi melalui PKn agar memiliki pengetahuan (*knowledge*),

---

<sup>39</sup> Menarik untuk dicermati bahwa sejak Era Reformasi 1998, pemerintahan reformasi membubarkan suatu lembaga yang bertugas melakukan pendidikan untuk masyarakat yaitu Badan Pembantu Presiden dalam Pemasarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (dsingkat BP7). BP7 inilah pada zaman pemerintahan Orde Baru yang bertugas melakukan pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat melalui penataran-penataran bagi warga negara Indonesia seperti pegawai negari sipil, para pejabat negara, para pemimpin informal, para sopir angkot/Bus Kota, para tokoh agama/ustadz dan segenap lapisan masyarakat lainnya. Tetapi sejak BP7 dibubarkan, maka sejak itu pulalah pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat *civic education for society* dan belum ada satu lembaga/instansipun yang melakukan atau ditugaskan melakukan hal ini. Lihat: Azwar Ananda, "Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter Bangsa", 262.

<sup>40</sup> Materi ajar yang harus ada dan tercakup dalam PKn dalam Negara demokrasi adalah sebagai berikut: (1). Aspek pengetahuan: struktur pemerintahan, undang-undang, hak dan kewajiban,

nilai-nilai (*values/disposition*) dan keterampilan (*skills*). Ke tiga hal ini akan bersinergi dan akan melahirkan warganegara yang berkompeten, berkomitmen dan percaya diri (*confident*) sebagai warganegara, dan tentu saja diharapkan mampu mengambil keputusan dalam hal memecahkan masalah-masalah yang berkaitan kehidupan warganegara.

Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai *citizenship education*, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian *inheren* dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam lima status. *Pertama*, sebagai mata pelajaran di sekolah; *Ke dua*, sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi; *Ke tiga*, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru; *Ke empat*, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh pemerintah sebagai suatu crash program; *Ke lima*, sebagai kerangka konseptual

---

perpajakan, kekuasaan pemerintahan Negara, sistem politik, hak azazi manusia, multikulturalisme, anti kekerasan; (2). Aspek Nilai dan Sikap: kesadaran kebangsaan/nasionalisme, menghormati simbol kenegaraan, kejujuran, patuh pada hukum, disiplin, toleransi, menghormati harkat dan martabat manusia, menghargai pendapat orang lain, anti kekerasan, multikulturalisme, tidak membedakan manusia, berdasarkan atas suku, agama, ras, warna kulit dll, kekeluargaan; (3). Aspek Keterampilan, mendengarkan pendapat orang lain, menyalurkan pendapat, mengkritisi kebijakan publik, berkomunikasi, bertanggungjawab, mematuhi peraturan, membiasakan antri, membaca informasi, menulis, berfikir, memimpin sidang/rapat, menulis surat/petisi/keputusan. Kemudian Butts (1980) juga mengusulkan 10 (sepuluh) konsep dasar PKn yaitu meliputi: *Justice, Freedom, Equality, Diversity, Authority, Privacy, Due to process, Participation, Personal obligation and public good, International human rights*. Melengkapi materi ajar ini USAID (1994) juga mengusulkan konsep dasar dan materi ajar yang harus tercakup dalam PKn yaitu: (4). *Knowledge: knowledge based, history, geography (Culture and economic), economic System, political system, social system and institution, world reality, humanities, moral education, alternative social arrangement, differences (ethnic, cultural, racial, political), human rights, element of true democratic (rights, solidarity, tolerances, respect), country constitution, country government, multiculturalism*; (5). *Values: respect (self and other), principle of democratic life, respect and defend human rights, care about other, sovereignty of people, justice, freedom, equality, authority, diversity, privacy, due to process, participation, responsibility (personal, civics, social), rule of law, civility, truth, tolerance, assistance of others, civic sense*; (6). *Skills: critical thinking, independent thinking, problem solving, literacy, communication/dialog, decision making, assessment of political situation, cooperation, protection and promotion of ones, interests and values, productive participation in work force, political, social, civics participation, community service, personal and social responsibility, dealing with differences, leadership*. Lihat: *Ibid.*, 262-264.

dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, ke dua, ke tiga, dan ke empat.

### **Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan,<sup>41</sup> “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>42</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (3) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (4) sehat, mandiri, dan percaya diri; (5) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang, sangat berkaitan dengan pembentukan karakter<sup>44</sup> peserta didik. Tujuan pendidikan

---

<sup>41</sup> Said Hamid Hasan dkk., *Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa: Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kemendiknas, 2010), 2.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Didik Suhardi dkk., *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembina Sekolah Menengah Pertama, 2010), 2.

<sup>44</sup> Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kata “karakter” diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Jadi orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat,

nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.<sup>45</sup>

Selain itu, ada beberapa landasan atau dasar hukum yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa antara lain:<sup>46</sup> (1). Undang-undang Dasar 1945 Amandemen; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) Permendiknas No 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan; (4) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi; (5) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan; (6) Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010-2014; (7) Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014; (8) Renstra Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2010-2014.<sup>47</sup>

Karakter seseorang dalam proses perkembangan dan pembentukannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan (*nurture*) dan faktor bawaan (*nature*). Tinjauan teoretis perilaku berkarakter secara psikologis merupakan perwujudan dari potensi *Intelligence Quotient* (IQ), *Emotional Quotient* (EQ), *Spiritual Quotient* (SQ) dan *Adverse Quotient* (AQ) yang dimiliki

---

bertabiat, atau berwatak. Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 682.

<sup>45</sup> Dari makna pendidikan karakter, maka karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir. Lihat: Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2007), 80.

<sup>46</sup> Desain Induk Penyusunan Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter: (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Tahap I: 2010-2014; Tahap II: 2014-2020; Tahap III: 2020-2025. (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, (3) Arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesra tanggal 18 Maret 2010 (4) Arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Nasional di Tampak Siring, Bali Tanggal 19-20 April 2010 (5) Arahan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Istana Negara Tanggal 11 Mei 2010. Lihat: Fasli Jalal, *Panduan: Pelaksanaan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), 5. Lihat juga: Ariantoni, *Panduan Pengintegrasian Berbagai Nilai dan Materi ke dalam mata pelajaran* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat kurikulum dan Perbukuan, 2011), 8-9.

<sup>47</sup> Suhardi dkk., *Pendidikan Karakter di SMP*, 10. Lihat juga: Edi Drajat Wiarto dkk., *Pendidikan Karakter: Kumpulan Pengalaman Inspiratif* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), 9-11.

oleh seseorang. Sedangkan seseorang yang berkarakter menurut pandangan agama pada dirinya terkandung potensi-potensi, yaitu: *siddiq, amanah, fatonah*, dan *tabligh*. Berkarakter menurut teori pendidikan apabila seseorang memiliki potensi *kognitif, afektif*, dan *psikomotor* yang teraktualisasi dalam kehidupannya. Adapun menurut teori sosial, seseorang yang berkarakter mempunyai logika dan rasa dalam menjalin hubungan intra personal, dan hubungan interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat.

Perilaku seseorang yang berkarakter pada hakekatnya merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (*kognitif, afektif, konatif*, dan *psikomotorik*) dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

Untuk mendapatkan wawasan mengenai arti pendidikan budaya dan karakter bangsa perlu dikemukakan pengertian istilah budaya, karakter bangsa, dan pendidikan.<sup>48</sup> Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni.<sup>49</sup> Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan

---

<sup>48</sup> Hasan dkk., *Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.*, 3.

<sup>49</sup> Ibid.

yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.<sup>50</sup>

Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Berdasarkan pengertian budaya, karakter bangsa, dan pendidikan yang telah dikemukakan di atas maka pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai berikut:

“Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai Pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.”<sup>51</sup>

Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Sesungguhnya *fitrah Ilahi* manusia adalah baik. Manusia telah dilengkapi oleh akal pikiran dan hati nurani oleh Tuhan YME untuk digunakan dalam menebar kebaikan di muka bumi. *Fitrah Ilahi* inilah yang seharusnya membentuk jati diri

---

<sup>50</sup> Suhardi dkk., *Pendidikan Karakter di SMP*, 11-12. Lihat Juga: Hasan dkk., *Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, 3-4. Lihat Juga: Asep Jihad, *Pendidikan Karakter Teori dan Implementasi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), 38-43.

<sup>51</sup> Hasan dkk., *Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, 4.

ketika dalam prosesnya berinteraksi dengan lingkungan membentuk karakter yang akhirnya berwujud perilaku keseharian. Sementara itu, karakter yang unggul dari tiap-tiap pribadi akan membentuk karakter masyarakat yang pada akhirnya akan membentuk karakter bangsa.<sup>52</sup>

### **Kontribusi Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan Islam adalah merupakan upaya normatif yang berfungsi untuk memelihara dan mengembangkan fithrah manusia, maka pendidikan Islam harus didasarkan pada nilai-nilai tersebut baik dalam menyusun teori dan praktek pendidikan. Implikasinya adalah pendidikan Islam harus memberikan hak yang sama dalam pendidikan. Selain dalam pendidikan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk jasmani-rohani, jangan sampai memperlakukan manusia seperti makhluk lain, atau memperlakukan manusia seperti mesin.<sup>53</sup>

*Humanisme teosentris* sebagai paradigma Ideologi Pendidikan Islam sepenuhnya memihak pada manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan-kabutuhan manusia untuk memelihara dan menyempurnakan keberadaanya sebagai makhluk paling mulia.

---

<sup>52</sup> Pembangunan karakter bangsa berlandaskan Pancasila sehingga didasarkan kepada Ketuhanan YME, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan persatuan Indonesia, menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, serta mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Padanan dalam Islam dapat dirujuk pada sifat: *siddiq, amanah, fatonah*, dan *tabligh*. Sedangkan bila dikaitkan dengan sifat sosiologis manusia dapat dipadankan dengan istilah *believer, thinker, doer*, dan *networker*. Lihat: Dirjen Dikdas, *Policy Brief: Pendidikan Karakter untuk Membangun Karakter Bangsa* (Jakarta: Kemendiknas, 2011), 5.

<sup>53</sup> Islam secara normatif maupun historis memiliki spirit yang luar biasa mengakui hak-hak manusia sebagai berikut: Persamaan dan kebebasan (S. al-Isra', 17: 70, S. an-Nisa', 4: 58, 105, 107 dan 135 dan S. al-Mumtahanah, 60: 8); Hak hidup (S. al-Maidah, 5: 45 dan S. al-Isra', 17: 33); Hak memperoleh perlindungan (S. al-Balad, 90: 12-17 dan S. at-Taubah, 9: 6); Hak kehormatan pribadi (S. at-Taubah, 9: 6); Hak menikah dan berkeluarga (S. al-Baqarah, 2: 221, ar-Rum, 30: 21, S. an-Nisa', 4: 1 dan S. at-Tahrim, 66: 6); Hak wanita sederajat dengan pria (S. al-Baqarah, 2: 228); Hak-hak anak dari orangtua (S. al-Baqarah, 2: 233 dan S. al-Isra', 17: 23-24); Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan (S. at-Taubah, 9: 122 dan S. al-'Alaq, 96: 1-5); Hak kebebasan memilih agama (S. al-Baqarah, 2: 256, S. al-Kahfi, 18: 29 dan S. al-Kafirun, 109: 1-6); Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka (S. an-Nisa', 4: 97 dan S. al-Mumtahanah, 60: 9); Hak untuk bekerja (S. at-Taubah, 9: 105, S. al-Baqarah, 2: 286 dan S. al-Mulk, 67: 15); Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama (S. al-Baqarah, 2: 275-278, S. an-Nisa', 4: 161 dan S. Ali Imran, 3: 130); Hak milik pribadi (S. al-Baqarah, 2: 29 dan S. an-Nisa', 4: 29); Hak menikmati hasil atau produk ilmu (S. al-Ahqaf, 46: 19 dan S. al-Baqarah, 2: 164); dan Hak tahanan dan narapidana (S. al-Mumtahanah, 60: 8).

*Humanisme* di dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan prinsip-prinsip keimanan. Karena, di satu sisi keimanan "*Tauhid*" sebagai inti ajaran Islam, menjadi pusat seluruh orientasi nilai, akan tetapi itu semua kembali untuk manusia "*Rahmatan Lil 'Alamin*".<sup>54</sup>

Mengingat agenda pendidikan tiada lain adalah pengembangan dan peningkatan kualitas SDM baik ditinjau dari segi ekonomis maupun nilai insani. Nilai ekonomis adalah menjadikan manusia lebih produktif dan nilainya lebih tinggi secara ekonomis, yang diperoleh melalui penguasaan ilmu dan teknologi. Nilai insani berupa nilai tambah budaya dan iman takwa yang menjadikan manusia lebih tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya melalui pendidikan yang sinergis antara pendidikan agama dan ilmu pengetahuan non agama.

Dengan kualitas SDM seperti tersebut di atas dimaksudkan agar peserta didik siap menghadapi tugas kehidupan masa depan, yang menurut Muhtar Buchari meliputi tiga tugas pokok yaitu: "(1) untuk dapat hidup, (2) untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna, (3) untuk memuliakan kehidupan."<sup>55</sup> Tercapainya ke tiga tugas hidup itulah berarti pendidikan mampu mengantarkan peserta didik yang dalam prespektif Islam menjadi hamba Allah yang memerankan peranannya sebagai *Khalifah Allah*.

Dalam konteks ini pendidikan Islam walaupun memiliki peranan strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam seluruh kegiatan pendidikan, namun baru berfungsi sebagian dari pendidikan Islam. Penyempitan lingkungan kelembagaan pendidikan Islam juga perlu diluruskan. Dengan menggunakan pendekatan substantif bukan pendekatan formal tekstual, substansi pendidikan nasional relevan dengan pendidikan Islam, karena pendidika Islam merupakan subsistem pendidikan nasional.

Relevansi substansi antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam terletak pada: "*pertama*, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam (*tauhid*); *ke dua*, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk jasmani-rohani yang berpotensi

---

<sup>54</sup> Al-Quran telah mendeklarasikan diri sebagai rahmat bagi seluruh alam (QS. al-Anbiya', 21:107).

<sup>55</sup> Muhtar Buchari, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 50.

menjadi manusia bermartabat (makhluk paling mulia); *ke tiga*, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi (fithrah dan sumber daya manusia) menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur dan berbagai kemampuan untuk memikul tanggung jawab”.<sup>56</sup>

Perbedaan antara keduanya karena hanya terletak pada posisi konsep. Ditinjau dari tatanan universalitas konsep Islam lebih universal karena tidak dibatasi negara dan bangsa, tetapi ditinjau dari posisinya dalam konteks nasional, konsep pendidikan Islam menjadi subsistem pendidikan nasional. Karena posisinya sebagai subsistem kadangkala dalam penyelenggaraannya pendidikan Islam hanya diposisikan sebagai suplemen. Hal ini mengingat bahwa secara filosofis (ontologis dan aksiologis) pendidikan Islam relevan dengan dan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, maka posisi pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional bukan sekedar berfungsi sebagai suplemen, tetapi sebagai komponen substansial. Artinya pendidikan Islam merupakan komponen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan nasional. Sebagaimana pemerintah dengan agenda kurikulumnya yang mengagas konsep pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, maupun pendidikan sebagai perwujudan bahwa pendidikan nasional sebagai sebuah sistem tidak mungkin melepaskan diri dari pendidikan Islam.<sup>57</sup> Secara yuridis hal ini telah terakomodir dalam undang-undang sisidiknas No. 20 tahun 2003.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Achmadi, “Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional,” pidato penguken guru besar dalam Ilmu Pendidikan Islam tanggal, 8 Januari 2005.

<sup>57</sup> Islam juga menekankan umatnya untuk mengapresiasi dan menghormati kemajemukan dan perbedaan. "Janganlah sekelompok dari kamu merendahkan kelompok yang lain, karena ada kemungkinan kelompok yang direndahkan tersebut lebih baik dari mereka." (QS. Al-Hujarat, 49:11). "Sungguh, Aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan membuatmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal satu sama lain." (QS. Al-Hujarat, 49:13). "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah menciptakan jagat raya dan memberimu dengan beragam bahasa dan ras." (QS. Ar-Rum, 30:22). "Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Al Baqarah, 2: 62).

<sup>58</sup> Lihat bahwa: “Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan menurut pasal 37 ayat 1 UUSPN wajib memuat pendidikan agama dan pendidikan Kewarganegaraan”. Lihat juga: *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, Nomor 20 Pasal 37 tahun 2003.

Oleh karena itu pendidikan agama Islam di sekolah perlu ditekankan pada pendidikan moral dan hendaknya pendidikan tersebut tidak hanya menekankan pengetahuan (kognisi) saja, termasuk sistem evaluasi proses belajar mengajar. Sikap dan perilaku lebih mencerminkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan daripada hanya pengetahuan pendidikan agama dan moral hendaknya juga terprogram dalam pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, orientasi pendidikan Islam sebaiknya juga menekankan aspek pembangunan kesadaran kritis peserta didik sehingga mereka mampu mengatasi situasi-batas (*limit-situation*) dan aksi-batas (*limit action*) mereka. Subyek yang kritis dalam pendidikan Islam mengandung dimensi politik dan kultural, tidak sekedar "keterampilan berpikir" atau memperoleh tingkat keterampilan kognitif yang tinggi, tanpa mempertimbangkan untuk apa keterampilan berpikir ini dikembangkan.

Dengan mempelajari agama yang benar dan utuh seseorang dapat terhindar dari sikap fanatisme keagamaan yang sering tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Juga dengan mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, seseorang dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain serta dari perbuatan yang mungkar dan merusak.

### **Kesimpulan**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kuat sikap respeknya terhadap perbedaan. Bangsa Indonesia dengan Bhineka Tunggal Iknnya tidak berangan-angan untuk melahirkan satu kesatuan *uniformity*, tapi kesatuan dalam keragaman yakni *unity in diversity* di sinilah pentingnya pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan karakter sebagai suatu pendekatan yang progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktek-praktek diskriminasi dalam pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan karakter merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran yang diarahkan pada upaya penguatan NKRI.

*Humanisme teosentris* sebagai paradigma Ideologi Pendidikan Islam sepenuhnya memihak pada manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan-kabutuhan manusia untuk memelihara dan menyempurnakan keberadaanya sebagai makhluk paling mulia. Islam sebagai agama universal memperlihatkan sikap saling menghargai dan menghormati antar pemeluk Islam dan dengan pemeluk agama lain dengan menjunjung nilai-nilai pluralisme, kesetaraan, kemanusiaan, dan toleransi sehingga dengan demikian tidak akan ada deskriminasi, subordinasi dan alienasi.

Pendidikan Agama Islam jika dikelola dengan baik akan mampu membentuk karakter kebangsaan keindonesiaan yang kokoh. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam sangat memiliki kontribusi dalam menyukseskan kebijakan pendidikan nasional dalam mewujudkan nilai-nilai perilaku atau karakter warga belajar yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Mahaesa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi *insan kamil* melalui konsep pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, maupun pendidikan karakter bangsa.

### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an Digital

Attas (al), Muhammad Naquib. *Konsep Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Abdullah, Abdurrahman Shaleh. *Teori-teori Pendidikan Islam berdasarkan al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

-----, *Islam Sebagai Paradima Ilmu Pendididkan*. Yogyakarta: Aditya Pelajar, 1992.

-----, "Dekonstrksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional", pidato pengukuhan guru besar dalam Ilmu Pendidikan Islam tanggal, 8 Januari 2005.

- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*. Bandung: Diponegoro, cet-3, 1996.
- Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- . *Menguak Misteri Ajaran-ajaran Agama Besar*. Jakarta: Golden Terayan, 1987.
- Azra, Azyumardi. "Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika "dalam *Tsaqofah*, Vol.I, No.2 (2003), 19.
- Aly, Abdullah. "Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia", dalam *Jurnal Ishraqi*, Volume II Nomor 1, Januari-Juli (2003), 60-73.
- Ariantoni. *Panduan Pengintegrasian Berbagai Nilai dan Materi ke dalam mata pelajaran*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat kurikulum dan Perbukuan, 2011.
- Arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesra tanggal 18 Maret 2010.
- Arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Nasional di Tampak Siring, Bali Tanggal 19-20 April 2010.
- Arahan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Istana Negara Tanggal 11 Mei 2010.
- Ananda, Azwar. "Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter Bangsa". *Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan* Vol 11, No 1 (2012), 260.
- Banks, James A. "Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. In the *Handbook of research on multicultural education*". New York: Macmillan. Ladson-Billings, G. *Toward a theory of culturally relevant pedagogy*. *American Educational Research Journal*, (1995), 465-492.
- . (ed.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989.
- Butts, R. Freeman. *The Revival of Civic Education: A Rationale for Citizenship in American School*. Palo Alto (CA.): Phi Delta Cappa, 1980.
- Cardinas, Jose A. *Multicultural Education: A Generation of Advocacy*. America: Simon & Schuster Custom Publishing, 1975.

- Cogan, John J. *Developing The Civil Society The Rule of Civic Education*. Bandung: CISED, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental Peranannya dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Jakarta: IAIN, 1984.
- Dirjen Dikdas. *Policy Brief: Pendidikan Karakter untuk Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas, 2011.
- Encyclopedia Americana*. Danbury: Grolier Inc., 1999. Vol.16, 742.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary ed.* New York: Continuum, 2006.
- Garcia, Ricardo L. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher 1982.
- Hasan, Said Hamid dkk. *Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa: Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kemendiknas, 2010.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
- Isna, Mansur. *Diskursus Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001.
- Jalal, Fasli. *Panduan: Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011.
- Jackson Robert, *Rethinking Religious Education in Plurality: Issue and Diversity and Pedagogy*. New York: RoutledgeFalmer, 2004.
- Jamali (al), Muhammad Fadhil. *Filsafat Pendidikan dalam al-Qur'an*, Terj. Judial alasani. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Jihad, Asep. *Pendidikan Karakter Teori dan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
- Koesoema, Doni. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo, 2007.

- Lankshear, Colin. "Functional Literacy from a Point of View," dalam Peter McLaren dan Peter Leonard (ed), Paulo Freire: *A Critical Encounter*. London and New York: Routledge, 1993.
- Langgulung, Hasan. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21*. Jakarta: Pustaka Al-husna, 1988.
- Lawrence, J. Saha (eds.). *International Encyclopedia of the Sociology of Education*. New York: Pergamon, 1997.
- Lee, S. Asian American as model-minorities? A look at their academic performance. *American Journal of Education* (1997), 103, 121-159.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Muhaimin dan Abdul Majid. *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Trikarya, 1993.
- McNeil, Jhon D. *Kurikulum: Sebuah Pengantar Komprehensif*, terj. Subandiah. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- McLaren, Peter. *Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundation of Education*. New York: Longman, 1998.
- Nuryanto, Agus. "Kontribusi Pendidikan Agama dalam Memperkuat Masyarakat Pluralistik Demokratik (Perspektif Islam)" <https://z4muttaqien.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Juni 2015.
- . "Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam (Perspektif Pedagogik Kritis)". *Kependidikan Islam*, (2009), Vol. 4: 107-125.
- . *Mazhab Pendidikan Kritis (Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan)*. Yogyakarta: Resist Book, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suparlan, Parsudi. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, 2-3.

- Suryadinata, Leo dkk. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Suhardi, Didik dkk. *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembina Sekolah Menengah Pertama, 2010.
- Sunarso, "Politik Pendidikan Tiga Rezim: Kajian Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi", Laporan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011. <http://staff.uny.ac.id>. Diakses pada 15 Mei 2015.
- Syaibany (al), Oemar Mohammad Al-Thoumy. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- The World Book Encyclopedia*. Chicago: World Book Inc., 1999. Vol. 4, 568.
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Tahap I: 2010-2014; Tahap II: 2014-2020; Tahap III: 2020-2025.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Pasal 37 tahun 2003.
- Wiarso, Edi Drajat dkk. *Pendidikan Karakter: Kumpulan Pengalaman Inspiratif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
- Zamroni. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011.